

Dampak Kebijakan Bea Ekspor Terhadap Komoditas Kakao Kabupaten Padang Pariaman

Impact of Bea Export Policy on Cocoa Commodity in Padang Pariaman Regency

Yulia Windi Tanjung*, FantashirAwwal Fuqara, Alfis Yuhendra

Program Studi Agribisnis Universitas Teuku Umar, Meulaboh

*Email: yuliawinditanjung@utu.ac.id

(Diterima 07-05-2024; Disetujui 21-06-2024)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan bea ekspor terhadap komoditas kakao di Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif survei yang menggunakan kuesioner dan wawancara. Metode penarikan sampel yaitu *proporsionate purposive sampling* dengan 40 responden. Metode analisis data yang digunakan yaitu *Policy Analysis Matrix* (PAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kebijakan bea ekspor yaitu kebijakan output (TO = Rp. -70.673.522,51, NPCO = 0,69), kebijakan input (TI = Rp. -585.152,91, NPCI = 0,92, TF = Rp. 2.480.279,36), dan kebijakan input-output (EPC = 0,68, TB = Rp. -72.568.648,96, KK = -1,03, RSP = -0,97).

Kata kunci: Kakao, Bea Ekspor, *Policy Analysis Matrix*

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of Bea Export Policy on cocoa commodity in Padang Pariaman Regency. This study uses a quantitative survey method using questionnaires and interviews. The sampling method is proporsionate purposive sampling with 40 respondents. Methods data is analyzed using Policy Analysis Matrix (PAM) and sensitivity analysis. The results showed that The Impact of government policy that is Output Policy (TO = Rp. -70.673.522,51, NPCO = 0,69), Input Policy (TI = Rp. -585.152,91, NPCI = 0,92, TF = Rp. 2.480.279,36), and Input-Output Policy (EPC = 0,68, TB = Rp. -72.568.648,96, KK = -1.03, RSP = -0.97).

Keywords: Cocoa, Bea Export, *Policy Analysis Matrix*

PENDAHULUAN

Kakao merupakan salah satu komoditas unggulan perkebunan bersifat strategis yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, menghasilkan devisa bagi negara, menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat dan membantu pelestarian fungsi lingkungan hidup (Kementerian Pertanian, 2014). Produksi biji kakao Indonesia menempati posisi ketiga dunia tahun 2016 dengan total produksi biji kakao terbesar yaitu 330 ribu ton setelah Pantai Gading yang menduduki posisi pertama dengan total produksi biji kakao tahun 2016 sebesar 1.570 ribu ton dan Ghana yang menempati posisi kedua dengan total produksi sebesar 820 ribu ton (ICCO, 2016). Negara tujuan ekspor utama komoditi kakao Indonesia yaitu Malaysia dengan total nilai ekspor pada tahun 2015 yaitu sebesar 33.735,8 ton, Singapura sebesar 5.850 ton, Jerman sebesar 2.103,3 ton dan Amerika Serikat 1.823,1 ton (Bank Indonesia, 2016).

Di Indonesia, menurut SK Menteri Perdagangan RI No. 07/M-DAG/PER/4/2005 ditetapkan bahwa pengelompokan barang ekspor meliputi barang yang diatur ekspornya, yaitu produk perkebunan (kopi), kayu dan produk kayu, produk industri (pulp), produk pertambangan (intan), produk manufaktur (tekstil dan produk tekstil). Latar belakang pengaturan ekspor ini berkaitan dengan upaya menjamin tersedianya bahan baku bagi industri dalam negeri, untuk melindungi lingkungan dan kelestarian alam, serta upaya meningkatkan daya saing dan posisi tawar menawar. Latar belakang penetapan terhadap barang yang diawasi ekspornya lebih disebabkan karena barang-barang tersebut sangat dibutuhkan di dalam negeri. Hal ini dilakukan guna menjaga stabilitas perdagangan, konsumsi dalam negeri, menjaga kelestarian alam, memenuhi kebutuhan, dan mendorong pengembangan industri di dalam negeri. Sedangkan barang yang dilarang ekspornya adalah barang-barang yang tidak dapat diekspor, dan yang terakhir adalah barang yang bebas

ekspornya adalah semua barang yang tidak termasuk ke dalam katagori barang yang diatur, diawasi dan dilarang (Sasono, 2013).

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah untuk mendukung pengembangan industri hilir kakao dalam negeri sehingga industri hilir kakao nasional kurang berkembang, antara lain adanya kebijakan pengenaan pajak produk primer dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang PPN atas komoditi primer. Pengenaan PPN sebesar 10% mengakibatkan beralihnya biji kakao yang tadinya diolah di dalam negeri menjadi diekspor dalam bentuk biji, sehingga industri pengolahan kakao tidak memperoleh bahan baku yang cukup, Akibatnya, beberapa perusahaan pengolahan biji kakao tidak dapat beroperasi. Tahun 2007 pemerintah mencabut kebijakan pengenaan PPN melalui PP No. 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Pemerintah melakukan upaya peningkatan produksi biji kakao melalui Program Gerakan Nasional Kakao pada tahun 2009 dan masih berlanjut sampai sekarang. Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah melakukan kebijakan pengenaan Bea Keluar Biji Kakao pada bulan April 2010 melalui PMK No. 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Bea Keluar Kakao. Rangkaian kebijakan tersebut diambil pemerintah dalam rangka menghidupkan kembali industri pengolahan kakao dalam negeri (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2017). Kebijakan BK biji kakao bertujuan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, peningkatan nilai tambah dan daya saing industri pengolahan kakao dalam negeri. Tarif Bea Keluar untuk komoditi biji kakao berpedoman pada harga referensi yang didasarkan pada harga rata-rata CIF kakao Intercontinental Exchange (ICE), New York, satu bulan sebelum penetapan HPE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Harga referensi yang dimaksud berdasarkan PMKRI No. 39/PMK.010/2022 Penetapan Barang Ekspor Yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Harga Referensi biji kakao sampai USD 2.000 (dua ribu Dollar Amerika Serikat) – USD 2.750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat) per ton (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022).

Pengenaan BK terhadap biji kakao diharapkan dapat memberi insentif bagi pengembangan industri dalam negeri. Namun, pembebanan BK secara tidak langsung akan dibebankan kepada petani kecil dan konsumen. Penetapan BK akan berdampak pada harga dan volume ekspor komoditas tersebut. BK masih menjadi masalah karena petani tidak saja dibebani BK namun juga biaya pemasaran dan keuntungan eksportir, harga yang diterima petani semakin rendah. Dampak penerapan BK lainnya adalah adanya pernggeseran penggunaan biji kakao dalam negeri sebagai bahan baku industri lokal yang terus meningkat sekaligus tumbuhnya industri-industri baru pengolah kakao. Namun, peningkatan jumlah industri kakao bukan parameter kuat terhadap kemajuan industri kakao dalam negeri (Asheri, 2014).

Kakao ditetapkan sebagai komoditi unggulan Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan kesepakatan 2008-2013 Surat Sekda No. 518/210/Kop.1/III/2008 tanggal 31 Maret 2008. Kabupaten Padang Pariaman merupakan sentra kakao terbesar kedua di Sumatera Barat dengan total produksi kakao perkebunan rakyat di tahun 2015 sebesar 16.609 ton setelah Kabupaten Pasaman dengan total produksi kakao perkebunan rakyat sebesar 18.504 ton (Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, 2016). Sumatera Barat umumnya, Kabupaten Padang Pariaman khususnya masih mengekspor kakao dalam bentuk mentah yaitu biji kakao non fermentasi dibandingkan dengan produk olahan kakao. Pada tingkat internasional, permintaan untuk produk berbasis kakao khususnya *fine flavor/single origin*, coklat organik dan coklat murni, telah meningkat tajam dibandingkan dengan kakao konvensional berbasis pasar.

Tarif impor umum untuk biji kakao adalah 27%, dengan impor dari AFTA, Cina, Korea dan Jepang diperbolehkan dalam pada 0%. (Atase Perdagangan Kedutaan Besar Republik Indonesia Bangkok, 2016). Oleh karena itu, upaya penjajakan liberasi perdagangan bilateral antara Indonesia dengan Thailand diyakini dapat meningkatkan kinerja ekspor produk kakao nasional ke Thailand dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan pameran produk perkebunan salah satu sumber informasi bagi pengusaha Indonesia yang akan bermitra dengan pengusaha di Thailand seperti pameran internasional di Bangkok dan Pameran Kementerian Pertanian (Atase Perdagangan Kedutaan Besar Republik Indonesia Bangkok, 2016). Tidak ada kendala lain untuk penjualan biji kakao Indonesia dan bubuk kakao. Namun, kurangnya informasi tentang produk dan produsen Indonesia khususnya Kabupaten Padang Pariaman. Perusahaan Indonesia tidak menanggapi permintaan ekspor dan untuk contoh atau sampel yang dikirim tidak memenuhi spesifikasi dari pembeli (Atase Perdagangan Kedutaan Besar Republik Indonesia Bangkok, 2016).

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yaitu menganalisis dampak kebijakan bea ekspor terhadap komoditas kakao di Kabupaten Padang Pariaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Padang Pariaman merupakan daerah sentra produksi kakao terbesar kedua di Sumatera Barat (Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, 2016) dan kakao ditetapkan sebagai komoditi unggulan Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan kesepakatan 2008-2013 Surat Sekda No. 518/210/Kop.1/III/2008 tanggal 31 Maret 2008. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif survei. Instrumen penelitian yaitu menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini merupakan petani kakao di Kabupaten Padang Pariaman yang berjumlah 2.559 orang yang tersebar di 3 kecamatan. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Cluster Sampling* yang digunakan untuk mengambil sampel karena objek yang diteliti sangat luas yaitu petani kakao dari suatu Kabupaten. Berdasarkan *cluster sampling* yang dilakukan, maka dipilih kecamatan dengan produksi kakao terbesar yang dijadikan pusat pengembangan kakao yaitu meliputi kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kecamatan Sungai Garingging dan Kecamatan Patamuan. Dari 2.559 populasi petani kakao maka dari 3 kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman secara *proporsionate purposive sampling* diambil 40 orang untuk dijadikan sampel mewakili populasi. Kriteria khusus terhadap sampel, yaitu: (1) pada setiap petani yang memiliki luas lahan (<0,5 ha, 0,5-1,0 ha, dan >1,0 ha); (2) sampel telah mengusahakan budidaya kakao dengan tanaman belum menghasilkan (TBM) dan tanaman menghasilkan (TM); (3) sampel dibagi kedalam 4 kategori umur tanaman (1-5 tahun, 6-10 tahun, 11-15 tahun, >15 tahun). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara (*interview*) langsung kepada Kepala Bidang Perkebunan, Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kab. Padang Pariaman, wawancara dengan pedagang pupuk anorganik dan organik, pelaku usaha dan transportasi serta pengisian kuesioner yang diberikan kepada petani kakao yang menjadi responden penelitian. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai pusat data yang memiliki poll data. Variabel penelitian yaitu perhitungan keuntungan privat dari data bujet usahatani dan pengolahan hasil, dimulai dengan menghitung pendapatan, biaya input tradable (pupuk anorganik), biaya sosial, biaya faktor domestik (pestisida cair dan padat, bibit kakao, pupuk organik, tenaga kerja, lahan, modal kerja, peralatan perkebunan), output (produksi kakao) dan keuntungan pada harga privat (harga aktual). Metode analisis data yaitu menggunakan *Policy Analysis Matrix* (PAM).

Matriks PAM terdiri atas dua identitas, identitas tingkat keuntungan (*profitability identity*) dan identitas penyimpangan (*divergences identity*). Identitas keuntungan adalah hubungan perhitungan lintas kolom dari matriks. Keuntungan didefinisikan sebagai pendapatan dikurangi biaya. Matriks PAM dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Policy Analysis Matrix (PAM)

	Pendapatan	Biaya		Keuntungan
		Input Tradabel	Faktor Domestik	
Privat	A	B	C	D
Sosial	E	F	G	H
Divergensi	I	J	K	L
Keterangan				
Keuntungan Privat (D)	= A – (B+C)		Transfer Input Asing (J)	= B – F
Keuntungan Sosial (H)	= E – (F+G)		Transfer Input Domestik (K)	= C – G
Transfer Output	= A – E		Transfer Bersih (L)	= I – (K+J)

Sumber: Pearson, 2005

Analisis Dampak Kebijakan Output Transfer Output merupakan selisih antara penerimaan privat dengan sosial dari aktivitas produksi, yaitu $TO = I = A - E$. Jika nilai $TO > 0$, Koefisien Proteksi Output Nasional (*Nominal Protection Coefficient on Output/NPCO*),

$$NPCO \text{ (Nominal Protection Coefficient Output)} = \frac{A}{E}$$

Keterangan:

A = Penerimaan privat

E = Penerimaan sosial

Analisis Dampak Kebijakan Input, Nilai Transfer Input (TI) yaitu $TI = J = B - F$, Rasio untuk mengukur transfer input tradabel adalah Koefisien Proteksi Input Nominal (*Nominal Protection Coefficient on Input* = NPCI). $NPCI = B/F$. Nilai Transfer Faktor (TF) yaitu $TF = K = C - G$

Analisis Dampak Kebijakan Input-Output, EPC merupakan analisis gabungan proteksi output dengan input, dirumuskan dengan EPC (*Effective Protection Coefficient*)

$$EPC = \frac{A-B}{E-F}$$

Transfer bersih merupakan selisih antara keuntungan privat dengan keuntungan sosial, yaitu $TB = L = D - H$. Nilai TB juga menggambarkan selisih antara transfer output dan transfer input. Koefisien keuntungan adalah perbandingan antara keuntungan bersih privat dengan keuntungan bersih sosial, dirumuskan: $KK = D/H$. Rasio Subsidi Bagi Produsen (SRP) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seluruh dampak transfer $SRP = L/E$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan yang ditetapkan pemerintah terhadap suatu komoditi seperti kakao bertujuan untuk melindungi produsen maupun konsumen dalam negeri. Kebijakan dalam suatu aktivitas ekonomi dapat berdampak positif maupun negatif terhadap para pelaku ekonomi. Dampak kebijakan pemerintah yang diidentifikasi dari analisis PAM meliputi dampak kebijakan pemerintah terhadap output, input dan dampak kebijakan terhadap input dan output. Kebijakan pemerintah ada yang bersifat disortif dan ada yang bersifat konstruktif.

Tujuan ekspor kakao Sumatera Barat termasuk Kabupaten Padang Pariaman yaitu negara Thailand dengan total ekspor biji kakao pada tahun 2014 sebesar 1.918 ton. Pemerintah melakukan kebijakan perdagangan biji kakao dengan Thailand yaitu dengan adanya kesepakatan non tarif untuk meningkatkan daya saing kakao Indonesia dengan negara pengeskor kakao lainnya. Dengan adanya kebijakan perdagangan negara Thailand yaitu menetapkan tarif 0% untuk negara anggota AFTA (*Asean Free Trade Area*) dan 25% untuk tarif normal maka memberi peluang bagi biji kakao Indonesia untuk bersaing dengan biji kakao dari negara pengeksor lainnya seperti Ghana dan Pantai Gading. Dengan pemberlakuan tarif 0 % mengakibatkan harga kakao Indonesia termasuk kakao Kabupaten Padang Pariaman menjadi lebih murah dari pesaing. Dengan demikian permintaan terhadap kakao Indonesia pun semakin besar.

a. Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Output

Kebijakan pemerintah terhadap output dijelaskan oleh nilai Transfer Output (TO) dan koefisien proteksi output nominal (*Nominal Protection Coefficient on Output/NPCO*). TO merupakan selisih antara penerimaan privat dengan sosial dari aktivitas produksi. Nilai TO memperlihatkan besarnya transfer dari masyarakat ke produsen karena masyarakat harus membeli output dengan harga yang lebih tinggi dari seharusnya. Sedangkan NPCO menunjukkan dampak insentif pemerintah yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai output yang diukur dengan harga privat dan sosial. Bentuk distorsi pemerintah pada output dapat berupa subsidi ataupun kebijakan hambatan perdagangan berupa tarif dan pajak ekspor/impor. Dari hasil penelitian didapatkan nilai masing-masing indikator yang dijelaskan pada tabel 2.

Tabel 2. Nilai Transfer Output (TO) dan Koefisien Proteksi Output Nominal (*Nominal Protection Coefficient on Output/NPCO*) Usahatani Kakao di Kabupaten Padang Pariaman

No	Indikator	Nilai
1	Transfer Output (TO)	-70.673.522,51
2	Koefisien Proteksi Output Nominal (<i>Nominal Protection Coefficient on Output / NPCO</i>)	0,69

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Berdasarkan tabel 2 diketahui nilai TO negatif yaitu bernilai Rp -70.673.522,51. Nilai $TO < 0$ berarti terdapat kebijakan tidak adanya subsidi pada output yang membuat harga privat lebih rendah dari harga sosialnya. Untuk output ekspor, angka negatif menunjukkan bahwa kebijakan bea ekspor sebesar US\$ 3.065,27/ MT menyebabkan harga output kakao yang diterima produsen di dalam negeri sebesar Rp. 20.425/ kg lebih kecil dari harga kakao pasar dunia yaitu sebesar Rp29.574,37/kg. Hal ini berarti pemerintah belum memberikan proteksi terhadap petani kakao

karena petani memperoleh penerimaan di bawah harga sosialnya. Sebagian besar output transfer disebabkan oleh kebijakan yang disortif. Salah satu sumber distorsi adalah kebijakan harga – hambatan perdagangan atau pajak/subsidi – yang diterapkan untuk mencapai tujuan non-efisiensi. Penyebab kedua yaitu disequilibrium nilai tukar yang terjadi akibat dari kebijakan makroekonomi. Harga efisiensi dari output adalah harga dunia untuk barang yang sejenis (komparabel). Kebijakan yang disortif menyebabkan harga domestik berbeda dengan harga efisiensinya, dan penetapan nilai tukar yang salah akan menyebabkan konversi harga dunia ke dalam harga domestik menjadi salah pula.

Beberapa faktor yang diduga menyebabkan harga privat kakao yang lebih rendah adalah adanya ketentuan SK Menteri Perdagangan RI No. 07/M-DAG/PER/4/2005 ditetapkan bahwa pengelompokan barang ekspor meliputi barang yang diatur ekspornya, yaitu produk perkebunan (kopi), kayu dan produk kayu, produk industri (pulp), produk pertambangan (intan), produk manufaktur (tekstil dan produk tekstil). Kebijakan berupa penetapan barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (BK) sejak April 2010 melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.011/2010, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1002/KM.4/2016 tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Perhitungan Bea Keluar dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/1/2016 Tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar. Perbedaan harga pada struktur privat dan struktur sosial menimbulkan terjadinya transfer intensif dari produsen ke konsumen sehingga menyebabkan konsumen membeli barang dengan harga yang lebih rendah dari harga yang seharusnya dibayar kepada produsen.

Berdasarkan tabel 2 diketahui nilai NPCO yaitu sebesar 0,69, penerimaan privat sebesar Rp157.771.157,71 per hektar, sedangkan penerimaan sosial sebesar Rp228.444.680,22 per hektar, sehingga didapatkan nilai NPCO sebesar 0,69. Nilai NPCO < 1 menunjukkan akibat kebijakan pemerintah, harga privat lebih kecil dari harga dunia, sehingga dapat dikatakan bahwa produsen output memberikan nilai transfer kepada pemerintah. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa kebijakan pemerintah untuk kakao di Kabupaten Padang Pariaman belum berjalan efektif sehingga terjadi pengurangan penerimaan produsen/petani kakao. Salah satu hal yang menjadikan rendahnya harga kakao di tingkat petani di lokasi penelitian adalah kualitas biji kakao yang diproduksi. Rendahnya tingkat fermentasi dari biji kakao mengakibatkan rendahnya bargaining position (posisi tawar) petani.

b. Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Input

Dampak kebijakan pemerintah terhadap input tradabel dijelaskan dengan nilai Transfer Input (TI) dan koefisien proteksi input nominal (*Nominal Protection Coefficient on Input/NPCI*). Dampak kebijakan input domestik dijelaskan oleh Transfer Faktor (TF). TI menunjukkan kebijakan pemerintah yang diterapkan pada input tradabel yang mengakibatkan terjadinya perbedaan input tradabel privat dan sosial. NPCI menunjukkan adanya proteksi maupun hambatan ekspor. Nilai TF menunjukkan besarnya subsidi terhadap input non tradabel (Nurmalina, 2010). Dari hasil penelitian didapatkan nilai masing-masing indikator yang dijelaskan pada tabel 3.

Tabel 3. Transfer Input (TI), Koefisien Proteksi Input Nominal (*Nominal Protection Coefficient on Input/NPCI*) dan Transfer Faktor (TF) Usahatani Kakao di Kabupaten Padang Pariaman

No	Indikator	Nilai
1	Transfer Input (TI)	-585.152,91
2	Koefisien Proteksi Input Nominal (<i>Nominal Protection Coefficient on Input/ NPCI</i>)	0,92
3	Transfer Faktor (TF)	2.480.279,36

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Berdasarkan tabel 3 diketahui nilai TI yaitu sebesar Rp -585.152,91. Transfer input dari usahatani kakao di Kabupaten Padang Pariaman memiliki nilai negatif. TI yang negatif menunjukkan kebijakan pemerintah keuntungan yang diterima secara finansial lebih besar dibandingkan dengan tanpa adanya kebijakan (Nurmalina, 2010). TI bernilai negatif berarti adanya kebijakan subsidi atau pajak pada input tradabel yang akan menambahi keuntungan produsen/petani karena mendapatkan insentif. Hal ini menunjukkan bahwa dalam usahatani kakao di Kabupaten Padang Pariaman, harga input tradabel yang dikeluarkan pada harga privat lebih rendah yaitu Rp6.978.203,81 daripada harga input tradabel pada harga sosial yaitu Rp7.563.356,72 sehingga Kabupaten Padang Pariaman

membayar input lebih kecil daripada kondisi seharusnya akibat adanya kebijakan pemerintah. Hal ini dikarenakan input tradabel berupa pupuk Urea yang digunakan dalam usahatani mendapatkan subsidi dari pemerintah. Sementara untuk pupuk TSP dan KCL jika membeli di kios pupuk tidak mendapatkan subsidi, jika membeli melalui kelompok tani maka mendapatkan subsidi namun nilai subsidi yang diberikan pemerintah tidak dikatehui nilainya. Kebijakan yang mempengaruhi input antara lain kebijakan bea masuk produk bahan baku impor sebesar 5 persen. Pada tanggal 22 Desember 2010, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.241/PMK.011/2010 yang menjadi dasar kebijakan kenaikan bea masuk atas impor barang. Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2007 mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen atas input-input produksi seperti peralatan, pupuk dan obat-obatan.

Berdasarkan tabel 3 diketahui nilai NPCI yaitu sebesar 0,92, nilai NPCI < 1 menunjukkan tidak adanya proteksi terhadap produsen input, sementara sektor yang menggunakan input akan diuntungkan dengan rendahnya biaya produksi (Nurmalina, 2010). Biaya input domestik lebih mahal dari biaya input pada tingkat harga dunia. Sistem seolah-olah dibebani pajak oleh kebijakan yang ada (Pearson, 2005). Artinya pemerintah menaikkan harga input tradabel di pasar domestik di bawah harga dunia. Hal ini terjadi karena pemerintah menetapkan kebijakan berupa bea masuk (pajak impor) dan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap input tradabel yaitu pupuk anorganik.

Berdasarkan tabel 3 diketahui nilai TF yaitu sebesar Rp2.480.279,36 per hektar, nilai TF bernilai positif yang artinya tidak ada subsidi pada input non tradabel (Nurmalina, 2010). Divergensi faktor domestik positif menyebabkan terjadinya implisit pajak atau transfer sumberdaya keluar sistem (Pearson, 2005). Input yang digunakan dalam produksi salah satunya adalah input faktor domestik dimana harga yang ditetapkan adalah harga aktual atau harga yang terjadi di pasar atau dalam negeri. Harga input domestik/non tradabel yang dikeluarkan pada tingkat harga privat lebih tinggi daripada tingkat harga sosial. Salah satu penyebab adanya transfer faktor adalah karena rendahnya biaya pada tingkat harga sosial untuk tenaga kerja. Dimana tenaga kerja dalam penelitian ini merupakan tenaga kerja yang tidak terdidik dan terlatih. Penghitungan harga bayangan tenaga kerja berdasarkan tingkat pengangguran yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman yaitu sebesar 5,8 % dikalikan dengan harga aktual/harga pasar.

c. Dampak Kebijakan Input-Output

Dampak kebijakan input-output dapat dijelaskan melalui analisis koefisien proteksi efektif (*Effective Protection Coefficient/EPC*), transfer bersih (TB), Koefisien Keuntungan (KK) dan rasio subsidi bagi produsen (RSP) (Nurmalina, 2010). Dari hasil penelitian didapatkan nilai masing-masing indikator yang dijelaskan pada tabel 4.

Tabel 4. Nilai Koefisien Proteksi Efektif (*Effective Protection Coefficient/EPC*), Transfer Bersih (*Net Transfer/TB*), Koefisien Keuntungan (KK) dan Rasio Subsidi bagi Produsen (RSP) Usahatani Kakao di Kabupaten Padang Pariaman

No	Indikator	Nilai
1	Koefisien Proteksi Efektif (<i>Effective Protection Coefficient/ EPC</i>)	0,68
2	Transfer Bersih (<i>Net Transfer/ TB</i>)	-72.568.648,96
3	Koefisien Keuntungan (KK)	-1,03
4	Rasio Subsidi bagi Produsen (RSP)	-0,97

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4 diketahui nilai EPC yaitu sebesar 0,68, EPC < 1 menunjukkan kebijakan untuk melindungi produksi tidak berjalan dengan baik. EPC menggambarkan arah kebijakan pemerintah apakah bersifat melindungi atau menghambat produksi domestik secara efektif (Nurmalina, 2010).

Berdasarkan tabel 4 diketahui nilai TB yaitu sebesar Rp -72.568.648,96, TB<0 maka nilai tersebut menunjukkan penurunan surplus produsen yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang dilakukan pada input dan output. Nilai TB juga menggambarkan selisih antara transfer output dan transfer input (Nurmalina, 2010). Transfer bersih dari sistem usahatani kakao adalah penjumlahan dari transfer output (Rp -70.673.522,51 per hektar) yang disebabkan oleh bea keluar, transfer input tradabel (Rp -585.152,91 per hektar) sebagai akibat dari subsidi pupuk urea, dan transfer faktor domestik (Rp 2.480.279,36 per hektar) yang timbul akibat ketidaksempurnaan pasar modal kerja (Pearson, 2005).

Berdasarkan tabel 4 diketahui nilai KK yaitu sebesar -1,03, KK < 1 menunjukkan kebijakan pemerintah membuat keuntungan yang diterima produsen lebih kecil bila dibandingkan tanpa

adanya kebijakan. KK adalah perbandingan antara keuntungan bersih privat dengan keuntungan bersih sosial (Nurmalina, 2010). Berdasarkan tabel 4 diketahui nilai RSP yaitu sebesar -0,97, nilai RSP negatif menunjukkan kebijakan pemerintah yang berlaku membuat produsen mengeluarkan biaya produksi lebih besar dari biaya imbalan untuk berproduksi (Nurmalina, 2010:135). Artinya, transfer bersih sebesar itu akan terjadi dengan bea ekspor kakao sebesar 97 % bila tidak ada divergensi lain.

KESIMPULAN

Dampak kebijakan bea ekspor terhadap komoditas kakao di Kabupaten Padang Pariaman terhadap output yaitu nilai (Transfer Output) $TO < 0$ negatif yaitu bernilai Rp -70.673.522,51 berarti terdapat kebijakan subsidi negatif pada output yang membuat harga privat lebih rendah dari harga sosialnya dan nilai (*Nominal Protection Coefficient on Output*) NPCO < 1 sebesar 0,69 produsen output memberikan nilai transfer kepada pemerintah. Kebijakan output kakao di Kabupaten Padang Pariaman belum berjalan efektif sehingga terjadi pengurangan penerimaan produsen/petani kakao. Dampak kebijakan pemerintah terhadap input yaitu nilai (Transfer Input) TI sebesar Rp -585.152,91, kebijakan pemerintah pada input tradabel menyebabkan keuntungan yang diterima secara privat lebih kecil dibandingkan tanpa adanya kebijakan. Nilai (*Nominal Protection Coefficient on Input*) NPCI < 1 sebesar 0,92. Nilai (Transfer Faktor) TF sebesar Rp2.480.279,36 perhektar. Dampak kebijakan pemerintah terhadap input-output yaitu nilai (*Effective Protection Coefficient*) EPC < 1 sebesar 0,68, menunjukkan kebijakan untuk melindungi produksi tidak berjalan dengan baik. Nilai (Transfer Bersih) TB < 0 sebesar Rp -72.568.648,96, penurunan surplus produsen yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang dilakukan pada input dan output. Nilai (Koefisien Keuntungan) KK < 1 sebesar -1,03, kebijakan pemerintah membuat keuntungan yang diterima produsen lebih kecil bila dibandingkan tanpa adanya kebijakan. Nilai (Rasio Subsidi Bagi Produsen) RSP sebesar -0,97, kebijakan pemerintah yang berlaku membuat produsen mengeluarkan biaya produksi lebih besar dari biaya imbalan untuk berproduksi.

DAFTAR PUSTAKA

- [ICCO]. (2016). Production of cocoa beans. *ICCO Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics*, Vol. XLII(3), Cocoa year 2015/16.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Kementerian Keuangan Republik Indonesia. In *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 39/PMK.010/2022*. Retrieved from <https://peraturanpajak.com/2017/02/20/pmk-13pmk-0102017/>
- [KEMENTAN]. Kementrian Pertanian. (2014). *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/Ot.140/5/2014 Tentang Persyaratan Mutu Dan Pemasaran Biji Kakao*.
- Tresliyana, Anggita, Anna Fariyanti, dan Amzul Rifin. (2015). Daya Saing Kakao Indonesia di Pasar Internasional. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 12(2), Juli 2015. Bogor. 13 hal.
- Asheri, Vitalia Puteri. (2014). Analisis Nilai Tambah Cokelat Batangan (Chocolate Bar) Di Pipiltin Cocoa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. [*Skripsi*]. Bogor. Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. 52 hal.
- [BPS]. Badan Pusat Statistik. (2015). *Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi dan Jenis Tanaman*, Indonesia (000 Ton) 2012 – 2015*
- [BPS]. Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman. (2016). *Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka*. 599 hal.
- [World Bank]. World Bank Group. (2017). *Commodity Markets Outlook April 2017*. Washington, DC. 72 hal.
- Departemen Perindustrian. (2007). *Gambaran Sekilas Industri Kakao*. Jakarta: www.depperin.go.id. 44 hal.
- Pearson, Scott, Carl Gotsch dan Sjaiful Bahri. (2005). *Aplikasi Policy Analysis Matrix Pada Pertanian Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 397 hal.
- Nurmalina, Rita dan Tanti Novianti. (2010). *Analisis Manfaat Biaya*. Bogor: Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. 183 hal.